

## **KONSEP STANDAR DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Risbon Sianturi<sup>1\*)</sup>, Nur Aini<sup>2)</sup>, Karina Salsabila Surya<sup>3)</sup>, Gina Khaerunnisa<sup>4)</sup>**  
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia  
Kampus Tasikmalaya

*risbonsianturi@upi.edu<sup>1</sup>, nur\_aini@upi.edu<sup>2</sup>,  
karinasalsabilasurya@upi.edu<sup>3</sup>, ginakhaerunnisa@upi.edu<sup>4</sup>*

*Diterima: 11 11 2022*

*Direvisi: 17 11 2022*

*Disetujui: 30 11 2022*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mngumpulkan informasi yang cukup terhadap konsep standar dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Artikel ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan teknik studi pustaka dengan cara menganalisis, membandingkan dan mengambil data dari beberapa artikel dan buku yang sama dengan isi judul yang diambil. Pendekatan konseptual ini dibangun secara teoritis dengan mengkaji secara seksama bersama anggota kelompok terkait permasalahan yang sedang dibahas. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan pada umumnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada pengelolaan sekolah karena pengelolaan pendidikan merupakan aktifitas luar biasa yang melibatkan banyak sumber daya. Standar pengelolaan pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting agar dapat berjalan dengan lancar karena pada dasarnya untuk mengelola suatu lembaga pendidikan itu tidak mudah jika dilakukan secara mandiri, akan tetapi jika dilakukan dengan seksama makan akan terasa mudah dan ringan.*

**Kata Kunci:** *Konsep, Pengelolaan, Pendidikan*



## PENDAHULUAN

Perwujudan visi nasional bangsa Indonesia tentang pendidikan, dalam UUD 45 telah diperlihatkan sejak dahulu yaitu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan instrumen nasional dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang maju, modern, Ilmiah, edukatif, religius, kompetitif dalam menghadapi persaingan global, Asean, AFTA dan NAFTA (Risbon & Elan, 2022). Istilah pendidikan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua orang, terlebih lagi di era globalisasi yang dikenal dengan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti sekarang ini. Berkembangnya IPTEK diikuti dengan berkembangnya pola pemikiran masyarakat. Pada perkembangan pemikiran masyarakat seperti sekarang ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab, persaingan untuk mempertahankan hidup semakin ketat dengan sulitnya lapangan pekerjaan sebagai modal untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Untuk mendukung terselenggaranya pendidikan formal bagi anak, tentunya guru perlu mengesampingkan *think fare share* yang tidak dapat dipisahkan dari bekerja sama dengan orang tua karena pada dasarnya pendidikan akan berjalan dengan lancar jika adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua ataupun masyarakat yang ada disekitar (Hasnidar & Elihami, 2019).

Menurut (Afis dalam (Januardi & Afriansyah, 2019)) pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang akan menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa, maka dari itu dibutuhkan untuk mengatur agar dapat terstruktur dengan baik. Dalam pandangan nilai, pendidikan mempunyai peran contril sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih *progreseivitas* dan warga masyarakat untuk meraih *progreseivitas* pada semua lini kehidupan. Pendidikan adalah proses sosialisasi untuk mencapai kompetensi pribadi dan sosial sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pendidikan bertujuan untuk mendewasakan anak, kedewasaan tersebut mencakup kedewasaan intelektual, sosial, emosional, dan moral tidak semata-mata kedewasaan dalam arti fisik saja. Sebagaimana yang tertuang dalam Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 yang berbunyi bahwa Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjanjidi

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam rumusan tersebut merupakan proses memuliakan manusia agar berkembang sesuai dengan potensi kebaikan yang dimilikinya (Sulaeman, 2021).

Menurut (Sulfemi Wahyu Bagja & Arsyad, 2012) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya seperti sarana dan prasarana serta pembiayaan. Kepala sekolah merupakan salah satu PTK yang posisinya memegang peran sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesional guru dan mutu pendidikan di sekolah. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat.

Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang didasari pada tujuan pendidikan nasional serta sejauh mana tujuan itu dapat dicapai pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung disekolah. Menurut (Mackenzie dalam (Sulfemi Wahyu

Bagja & Arsyad, 2012)) mengidentifikasi tiga dimensi pendidikan efektif yaitu kepemimpinan, keefektifan, dan efisiensi serta unsur pokok dan penunjang masing-masing dimensi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan teknik studi pustaka dengan cara menganalisis, membandingkan dan mengambil data dari beberapa artikel dan buku yang sama dengan isi judul yang diambil. Pendekatan konseptual ini dibangun secara teoritis dengan mengkaji secara seksama bersama anggota kelompok terkait permasalahan yang sedang dibahas. Titik fokus yang menjadi acuan dalam artikel ini terkait konsep standar dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami terkait konsep standar dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Pengelolaan Pendidikan**

#### **A. Pengertian**

Pengelolaan berasal dari kata bahasa Inggris management atau to manage yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan dan memperlakukan. Pengelolaan adalah suatu proses sistematis untuk mencapai tujuan dengan perencanaan yang tepat, arahan, dan pemanfaatan secara maksimal sehingga semua tujuan yang direncanakan dapat

dicapai secara efektif dan efisien (Herson A, 2017). Kata “pendidikan” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan kata “Education” yang secara etimologi diserap dari Bahasa Latin “Eductum”. Kata Eductum sendiri terdiri dari dua kata yaitu E yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, dan Duco yang bermakna sedang berkembang. Sehingga secara etimologis pendidikan adalah proses pengembangan dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Priatna (2004:27) dalam (Mulyadi & Haura, 2019) bahwa pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek.

Pengelolaan pendidikan ialah serangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, serta mengembangkan seluruh upaya didalam mengatur serta mendayagunakan sumber daya manusia, sarana serta prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Satori dalam (Hidayat & Machali, 2012) menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan ialah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia serta sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ada 3 dimensi penting didalam konsep pengelolaan diantaranya:

1. Dimensi pertama, dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

pengelola (peminpin, kepala sekolah, komandan). Dimensi ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan serta keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pengelola.

2. Dimensi kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama serta melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
3. Dimensi ketiga, pengelolaan itu dilakukan dalam organisasj, sehingga tujuan organisasj dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok.

#### B. Fungsi dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan

1. penyelenggaraan pendidikan yaitu Membuat Patasan yang merupakan salah satu fungsi administrasi yang perlu dilakukan oleh para administrator yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, prilakunya dan hasil keputusan.
2. Merencanakan, adalah persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Menurut Dudung A Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menjelaskan bahwa merencanakan mengandung pra rencana yang berisi, pengumpulan dan pengolahan data, diagnosa dan prognosis situasi, perumusan kebijakan, estimasi kebutuhan,

- menganggarkan kebutuhan, memilih sasaran, merumuskan rencana, perincian rencana, implementasi rencana, dan revisi dan perencanaan.
3. Mengorganisasikan, menurut Oteng Sutisna (1983) makna arti mengorganisasikan adalah sebagai kegiatan dalam menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan yang telah disepakati.
  4. Mengkomunikasikan adalah berani menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang lain atau dari kelompok yang satu dengan yang lainnya.
  5. Mengkoordinasikan, Oteng Sutisna (1983) mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota organisasi bahan dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam organisasi itu ke arah pencapaian tujuan yang telah disepakati.
  6. Megawasi meminit oleng Sutisna (1983) adalah suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya.
  7. Menilai Oteng sutisna (1983) mengartikan penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik

tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsi penilaian memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir periode kerja, mendukung dan menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran, memajukan pengembangan oragnisasi sekolah Prinsip penilaian dalam pengelolaan pendidikan.

Menurut Usman dalam (Kristiawan & Bengkulu, 2017) memamparkan unsur-unsur pengelolaan yaitu sebagai berikut.

1. Man (manusia), bserperan sebagai man power dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan/bawahan, serta memberikan tenaga dan juga pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan.
2. Material (barang), material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat

- terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi.
3. Machine (mesin), merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesian berupa peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional.
  4. Money (uang), money/modal dibagi menjadi 2, yaitu model tetap berupa tanah, gedung/bangunan, mesin serta modal kerja berupa kas, piutang.
  5. Mothod (metode), pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagaiaturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. Karena metode yang dipakai akan memengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran.
  6. Market (pasar), merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi, dalam lembaga pendidikan market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup.
  7. Minute (waktu), ialah waktu yang dipergunakan serta dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien.

## 2. Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar pengelolaan ialah salah satu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berperan menentukan terwujudnya mutu pendidikan di sekolah. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dimaksud, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik serta Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, serra Standar Penilaian. Betapa pentingnya eksistensi pengelolaan dalam menumbuhkan sebuah lembaga yang efektif, tak terkecuali sekolah sebagai lingkup manajerial utama dalam pendidikan. Kekuatan pengelolaan akan mampu mengendalikan serta mewujudkan efisiensi serta evektifitas sekolah. Pengelolaan yang baik akan membawa pada perubahan sekolah ke

pencapaian yang lebih baik sedangkan pengelolaan yang kurang baik akan menyebabkan stagnasi sekolah dalam pencapaian visi dan misi sekolah (Handoko et al., 2022).

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013). Standar Pengelolaan Pendidikan pada bagian kesatu tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian pada setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah. Pada aspek pengambilan keputusan dibagi menjadi keputusan akademik dan non akademik. Untuk pengambilan keputusan secara akademik melalui rapat Dewan Pendidik dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan keputusan non akademik dilakukan oleh komite sekolah dihadiri kepala satuan pendidikan. (REFIKA, 2018).

Standar Pengelolaan Pendidikan Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar pengelolaan

PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan meliputi:

a. Perencanaan Program

Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik. Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya dengan menyiapkan anak untuk masa depan bukan hanya untuk masa kini. Selanjutnya Kalender Pendidikan (KALDIK) sangatlah diperlukan untuk mengetahui hari efektif masuk sekolah dan hari libur sekolah. Umumnya kaldik dipergunakan sebagai pelengkap administrasi guru kelas, sekolah dan operator sekolah. Menurut (Kismianti, 2017) tata tertib adalah kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan. Sedangkan kode etik PAUD merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, yang secara sistematis dengan sengaja dibuat melalui kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.

Philip H. Combs (Rusdiana, 2015) mengemukakan lima ciri



perencanaan pendidikan sebagai berikut.

1. Berpandangan jangka pandang.
2. Terperinci
3. Diintegrasikan dengan rencana ekonomi yang lebih luas dan perkembangan masyarakat.
4. Merupakan bagian integral pengelolaan pendidikan.
5. Mmemperhitungkan bagian kualitatif, karena perkembangan pendidikan bukan perluasan secara kuantitatif saja.

b. Pengorganisasian

Merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan dengan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut seperti menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggungjawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

c. Pelaksanaan rencana kerja

Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang

diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak.

Jenis layanan sebagaimana dimaksud terdiri atas: Usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA atau SPS dengan satu kali pertemuan minimal 120 menit dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu; Usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB atau SPS dengan satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan Usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA atau SPS dengan satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

d. Pengawasan

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

### 3. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan

Adapun ruang lingkup pengelolaan pendidikan ini secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan tentang pendataan mata

- pelajaran/mata kuliah yang diajarkan, waktu yang tersedia. jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan. kegiatan belajar-mengajar, buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, kalender pendidikan, perubahan kurikulum, maupun inovasi-inovasi dalam pengembangan kurikulum.
- b. Pengelolaan peserta didik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. pengawasan dan evaluasi kegiatan pengalangan penerimaan siswa baru, pelaksanaan tes penerimaan siswa baru, penempatan dan pembagian kelas, kegiatan-kegiatan kesiswaan. motivasi dan upaya peningkatan kualitas lulusan dan sebagainya.
- c. Pengelolaan tenaga pendidikan (kepegawaian), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan penerimaan pegawai baru, mutasi, surat keputusan surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar umum kepegawaian, upaya peningkatan SDM serta kinerja pegawai, dan sebagainya.
- d. Manajemen keuangan pembiayaan pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi masuk dan keluarnya dana, usaha-usaha menggali sumber pendanaan sekolah seperti kegiatan koperasi serta penggunaan dan secara efisien.
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang pembagian dan penggunaan barang (inventaris). perbaikan barang, tukar tambah maupun penghapusan barang.
- f. Pengelolaan administrasi sekolah, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan sekolah agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang membutuhkan serta berhubungan dengan kegiatan lembaga.
- g. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat, misalnya pendataan alamat kantor/orang yang dianggap perin, hasil kerja sama, program-program humas.
- h. Pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan unit-unit penunjang, misalnya bimbingan dan konseling (BK) perpustakaan UKS. pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya.
- i. Pengelolaan ekstrakurikuler adalah seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara terorganisir mengenai kegiatan sekolah yang dilakukan diluar kelas dan diluar jam pelajaran kurikulum) untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus

untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajar maupun pilihan.

- j. Pengelolaan layanan khusus pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan khusus, misalnya menu makanan/konsumsi, layanan antar jemput, bimbingan khusus dirumah dan sebagainya.

#### 4. Urgensi Manajemen Pendidikan

Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan :

- (1) manajemen kurikulum
  - (2) manajemen peserta didik
  - (3) manajemen sarana dan prasarana
  - (4) manajemen tenaga pendidik
  - (5) manajemen hubungan masyarakat
  - (6) manajemen keuangan
  - (7) manajemen tenaga kependidikan
- (Aliyyah dkk., 2019)

#### KESIMPULAN

Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses

pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan pendidikan pada umumnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pada pengelolaan sekolah karena pengelolaan pendidikan merupakan aktifitas luar biasa yang melibatkan banyak sumber daya. Selain itu, memerlukan keterampilan tersendiri dalam memberdayakan segala sumber daya yang ada.

Standar pengelolaan pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting agar dapat berjalan dengan lancar karena pada dasarnya untuk mengelola suatu lembaga pendidikan itu tidak mudah jika dilakukan secara mandiri, akan tetapi jika dilakukan dengan seksama akan terasa mudah dan ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Risbon & Elan. (2022), *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Afifuddin, MM., & Sukito. (2008). *Pengelolaan Pendidikan "Teori dan Praktek"*. *Prospect*
- Aliyyah, R. R., Mulyadi, D., Widyasari, & Kholik, A. (2019). *Manajemen Lembaga Pendidikan* (Issue November).
- Handoko, G., Saepudin, A., & Barlian, U. C. (2022). Eduvis : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam STANDAR PENGELOLAAN DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG EFEKTIF (Analisis Deskriptif di SMA Negeri 8 Jakarta). *Eduvis, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 37–46.
- Hasnidar, H., & Elihami, E. (2019). The management Model of National Character Education

- for Early Childhood Education through based on Democracy. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 3(1), 15–19. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i1.75>
- Herson A. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5, 15–27.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 4–6.
- Januardi, Y., & Afriansyah, H. (2019). Konsep Dasar , Proses dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan. *Administrasi Pendidikan*, 5(1), 1–6.
- Kismianti, P. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan TK Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Di RA Al Muna Kota Semarang. *Universitas Negeri Semarang*.
- Kristiawan, M., & Bengkulu, U. (2017). *Manajemen Pendidikan*. April.
- Mulyadi, N., & Haura, N. (2019). “Pengertian Pendidikan.” *Academia*, 1–12.
- REFIKA, N. (2018). *IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI SMPN 4 4 BATU SANGKAR*.
- Rusdiana. (2015). *Pegelolaan Pendidkan* (p. 293).
- Sulaeman, D. (2021). Manajemen Satuan PAUD ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembambagaan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 458–462. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112>
- Sulfemi Wahyu Bagja, & Arsyad. (2012). PENGELOLAAN MANAJEMEN SEKOLAH YANG EFEKTIF DAN UNGGUL Wahyu. -, 02(09), 1–19.